

# **Analisis Penerapan E-Audit Pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kantor Akuntan Publik di Indonesia**

**Rudy Hartanto, Aditya Putra Pratama**

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Bandung, Bandung

## ***Abstract***

*This study aims to identify the challenges and barriers faced by the Indonesian Audit board (BPK) and the Public Accounting Firm (KAP) in implementing the e-audit system. E-audit, which utilises BPK's data centre to combine electronic data from various entities such as state ministries, local governments, SOEs, and BUMDs, aims to improve the efficiency and effectiveness of the state financial audit process. This concept, known as BPK Synergy, enables more efficient data recording, processing, exchange, utilisation and monitoring. The implementation of e-audit by BPK RI aims to streamline the planning and field inspection stages that were previously done manually. E-audit is designed to improve the efficiency and effectiveness of these audit stages. The implementation of e-audit provides a great opportunity for BPK and KAP in Indonesia to improve efficiency, accuracy, transparency, and service in state financial audit and public audit. However, challenges such as technological readiness, awareness of the importance of data security, and adequate workforce training must be overcome to optimise the benefits of e-audit.*

**Keyword:** *e-audit, implementation, Indonesian Audit board, Public Accounting Firm*

## **1. PENDAHULUAN**

Menurut konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didirikan untuk mengawasi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara. Namun, proses audit keuangan yang dilakukan oleh BPK menghadapi beberapa tantangan, termasuk panjangnya waktu audit. Keterlambatan ini terutama disebabkan oleh lambatnya entitas dalam menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada BPK. Dokumen-dokumen ini sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Selain itu, dengan semakin meluasnya ruang lingkup audit BPK dan terbatasnya jumlah auditor, BPK kesulitan untuk meningkatkan frekuensi audit kinerja.

Konstitusi Indonesia mengharuskan laporan keuangan setiap kementerian, lembaga pemerintah, dan badan usaha milik negara diaudit oleh BPK RI, yang mencakup sekitar 355 entitas. Berbeda dengan perusahaan audit pada umumnya, BPK RI berada dalam posisi unik karena tidak memungut biaya untuk layanan auditnya; anggarannya berasal dari dana pemerintah. Struktur pendanaan ini meningkatkan independensi BPK RI dari tekanan klien. Selain itu, independensi BPK RI semakin kuat berkat posisinya yang unik dalam pemerintahan Indonesia. BPK RI beroperasi sebagai entitas independen yang terpisah dari lembaga eksekutif, dan melapor kepada lembaga legislatif, tanpa dikendalikan oleh keduanya.

Pada tahun 2009, BPK RI meluncurkan program percontohan bernama e-audit untuk meningkatkan kualitas audit dalam organisasi. Melalui program ini, BPK akan bekerja sama dengan kliennya untuk membangun pusat data. Pusat data ini memungkinkan BPK untuk mencatat, memproses, bertukar, memanfaatkan, dan memantau data dari berbagai sumber, sehingga memfasilitasi perbandingan dan pemeriksaan yang lebih efisien. Tujuan dari program ini adalah untuk menilai kembali keandalan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara, sesuai dengan mandat konstitusi Indonesia yang bebas dari korupsi. Dimana faktor korupsi yang semakin tinggi akan berdampak pada perekonomian suatu negara baik dari meningkatnya kemiskinan maupun ketimpangan kehidupan sosial dikarenakan pemanguna yang tidak merata (Amaliah et al., 2021; Fadilah, Lestari, Sahdan, & Sahdan, 2020; Fadilah, Maemunah, & Hernawati, 2019; Fadilah, Nurlili, et al., 2021; Fadilah, Rosidana, et al., 2021;

Nurhasanah, Nurhayati, & Surahman, 2020). Selain itu, penggunaan e-audit juga bertujuan untuk mengatasi masalah ketidakcocokan data dalam transaksi antara klien audit BPK atau antara klien audit dengan pihak ketiga, yang seringkali memaksa auditor BPK untuk melakukan prosedur tambahan guna memverifikasi keabsahan dan kelengkapan.

BPK RI telah memperkuat proses pemeriksaan keuangan negara dengan mengadopsi sistem e-audit yang memanfaatkan pusat data BPK untuk menggabungkan data elektronik BPK dengan data elektronik dari entitas yang diperiksa, seperti kementerian negara, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Konsep ini, yang disebut BPK Sinergi, memungkinkan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan, dan monitoring data dari berbagai pihak untuk pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif. Dengan strategi link and match, BPK mengidentifikasi dan mengolah data yang dibutuhkan dari berbagai sumber untuk pemeriksaan elektronik. Pembentukan BPK Sinergi ini sangat penting mengingat banyaknya entitas yang harus diperiksa dan terbatasnya jumlah pemeriksa BPK, yang per 1 Desember 2010 hanya berjumlah 2.717 orang.

Tujuan utama penelitian ini adalah Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BPK dan KAP dalam mengimplementasikan e-audit, seperti masalah infrastruktur teknologi, keamanan informasi, dan kesiapan tenaga kerja, Mengeksplorasi keuntungan dan manfaat yang diperoleh BPK dan KAP dari penggunaan e-audit, seperti peningkatan kolaborasi, akses data real-time, dan pengurangan kesalahan manusia, dan Menilai tingkat kepuasan auditor dan staf administrasi BPK dan KAP terhadap sistem e-audit, termasuk kemudahan penggunaan dan dukungan teknis yang tersedia.

## **2. Literature Review**

E-audit adalah sebuah sistem yang menciptakan sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dan sistem informasi milik entitas yang diperiksa (e-Auditee) melalui komunikasi data online. Sistem ini membentuk Pusat Data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK(Purnamasari, Amran, & Hartanto, 2022).Pusat data keuangan negara ini mencakup seluruh informasi keuangan dari semua satuan kerja di lingkup pemerintah, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah, transaksi keuangan, dan data pendukung lainnya yang diperlukan untuk pemeriksaan. Pusat data ini digunakan oleh pemeriksa untuk membantu dalam melakukan tugas pemeriksaan. Pemeriksa dapat mengakses sistem e-audit melalui portal yang tersedia, asalkan ada jaringan internet, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka di mana saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas BPK dijelaskan dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa BPK bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Sistem e-Audit telah diterapkan untuk membantu auditor BPK-RI dengan menyediakan data dari auditee. Sistem ini mengintegrasikan sistem internal BPK- RI dengan sistem auditee untuk membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memungkinkan komunikasi data secara online (Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2012). Sistem ini menyediakan informasi dasar seperti profil auditee dan basis data keuangan mereka. Selain itu, sistem ini memungkinkan auditor mencari data pendukung terkait perjalanan dinas, dana anggaran, pencairan dana, dan pendapatan untuk pemerintah pusat dan daerah, kementerian, dan lembaga. Untuk memastikan otoritas pengguna, auditor

harus terdaftar dalam sistem berdasarkan surat tugas resmi untuk pemeriksaan. Auditor hanya dapat mengakses dan mengambil data dari entitas yang sedang diaudit.

Menurut Nindyastuti & Kiswara (2014), Electronic Audit, atau E-Audit, adalah audit berbantuan komputer yang memanfaatkan catatan elektronik untuk melakukan seluruh atau sebagian proses audit. E-Audit pemerintah melibatkan pengembangan perangkat lunak yang disesuaikan untuk membuat basis data yang menyimpan berbagai informasi kinerja keuangan untuk entitas pemerintah.

E-audit bertujuan untuk mendapatkan data dari auditee dengan cepat dan andal. E-audit menyederhanakan proses birokrasi yang rumit dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU) antara maskapai penerbangan dan BPK, sehingga data dapat langsung dikirim dari server auditee dan server terkait lainnya ke server e-audit tanpa harus ada permintaan tersendiri dari auditor. Cara ini dinilai sangat efisien untuk melakukan audit, menghemat waktu dan mengurangi biaya transportasi yang terkait dengan kunjungan ke auditee. Namun demikian, auditor tetap perlu bertemu dengan auditee untuk keperluan konfirmasi dan komunikasi, serta melakukan prosedur audit yang diperlukan seperti pemeriksaan fisik (Cahyono, 2016).

E-audit diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi para auditor BPK dengan memfasilitasi pengumpulan dan analisis bukti-bukti audit, sehingga memungkinkan audit yang lebih cepat dan komprehensif. Terlepas dari harapan untuk menyederhanakan proses audit, mantan wakil ketua BPK periode 2009-2015, yang mengawasi proyek e-audit, mencatat bahwa tidak adanya studi kelayakan sebelum pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran apakah e-audit dapat secara efektif mencapai tujuan audit BPK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit keuangan negara (Praseno, 2012).

Menurut Pasal 1 UU No. 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. Menurut Abdul Halim (2015:35), Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bergerak di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.

### **3. Metodologi Penelitian**

Studi literatur adalah serangkaian tindakan yang mencakup membaca, mencatat, dan mengelolah bahan penulisan serta metode pengumpulan data pustaka (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan metode studi literatur. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial dengan melihat dunia seperti apa adanya daripada seperti yang seharusnya (Mamik, 2015). Seperti yang dinyatakan oleh Kadri (2018), studi literatur adalah proses mencari referensi teori yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki. Referensi dapat diperoleh dari artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, jurnal, dan hasil penelitian. Kegiatan ini menghasilkan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan masalah dan menjadi dasar teori untuk studi dan desain penelitian (Kadri, 2018). Peneliti menggunakan data dari kajian terdahulu terkait dengan electronic audit pada BPK dan KAP.

### **4. Pembahasan**

Menurut Penelitian Kholis dan Prayogi (2019) Penerimaan sistem didefinisikan sebagai kesesuaian sistem dengan spesifikasi fungsional yang dinyatakan (validasi). Para peneliti telah mengidentifikasi beberapa indikator untuk menjelaskan penerimaan TI, dengan kepuasan pengguna dan penggunaan sistem yang paling menonjol. Menurut penelitian yang dikutip oleh Al-Gahtani (2001) (Davis dkk., 1989; Thompson, 1991; Adams dkk., 1992; Straub dkk., 1995; Szajna, 1996; Igbaria dkk., 1997), penggunaan sistem merupakan indikator utama penerimaan teknologi. Penelitian ini mengadaptasi konstruk penerimaan TI dari Technology Acceptance

Model (TAM) menjadi Penerimaan Pengguna TAB (Purnamasari, Pramono, Haryatiningsih, Ismail, & Shafie, 2020).

Penelitian Kholis dan Prayogi (2019) ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan sikap pengguna mempengaruhi penerimaan aplikasi e-audit, baik secara individual maupun kolektif. Temuan dari penelitian ini adalah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan aplikasi e-audit. Persepsi kebermanfaatan juga berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan aplikasi e-audit. Sikap pengguna secara signifikan dan positif mempengaruhi penerimaan aplikasi e-audit. Secara bersama-sama, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kebermanfaatan, dan sikap pengguna secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan aplikasi e-audit.

Menurut Penelitian Muhammad Daud (2023) Penerapan e-audit oleh BPK Perwakilan Provinsi DIY telah berhasil meningkatkan kinerja pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya pada tahap pelaksanaan pemeriksaan (pengumpulan dan analisis bukti pemeriksaan), sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien bagi pemeriksa. Namun demikian, e-audit belum memenuhi kebutuhan auditee dalam mengakses laporan hasil pemeriksaan BPK, menyampaikan tanggapan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan memonitor status temuan pemeriksaan melalui portal e-auditee BPK secara online. Penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan sistem e-audit untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupannya dengan memasukkan audit kinerja dan audit khusus. Selain itu, penelitian ini terbatas pada tahapan pelaksanaan audit, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi penggunaan e-audit dalam perencanaan dan pelaporan audit.

Penelitian Dharma dkk. (2017) bertujuan untuk menganalisis anteseden penerimaan e-Audit di BPK-RI dengan mengintegrasikan teori dasar Technology Acceptance Model (TAM) dengan Innovation Diffusion Theory (IDT), model kesuksesan informasi (DeLone dan McLean), dukungan manajemen, dan faktor individual dari Technology Readiness Index (TRI). Temuan menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat pengguna untuk menggunakan teknologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk e-Audit, faktor-faktor ini harus diprioritaskan oleh BPK-RI, terutama oleh otoritas tertinggi dan tim pengembangan sistem.

Kualitas sistem muncul sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan (Ali, Parveen, Aspiranti, Nurhayati, & Rusgianto, 2023; Izzaturahman, Lestari, & Nurhayati, 2023; Nurhayati, Hartanto, Paramita, Sofianty, & Ali, 2023; Nurhayati, Hartanto, & Pramono, 2023; Nurhayati & Susanto, 2017; Purnamasari, Amran, Nu'man, et al., 2022). Semakin tinggi kualitas sistem e-Audit, semakin banyak pengguna yang menganggapnya mudah digunakan dan bermanfaat, sehingga meningkatkan niat auditor untuk menggunakan e-Audit. Faktor penting lainnya adalah kompatibilitas, yang secara langsung mempengaruhi persepsi kegunaan dan niat untuk menggunakan. Sistem e-Audit harus selaras dengan seluruh proses pemeriksaan agar bermanfaat sepenuhnya bagi auditor, sehingga meningkatkan niat mereka untuk menggunakannya.

Faktor individu yang berdampak negatif terhadap manfaat yang dirasakan dari penggunaan sistem adalah rasa ketidaknyamanan dengan teknologi baru. Ketidaknyamanan ini berdampak negatif pada manfaat yang dirasakan dan, akibatnya, niat untuk menggunakan sistem. Oleh karena itu, berbagai metode untuk membiasakan auditor dengan sistem harus diterapkan untuk mengatasi ketidaknyamanan ini. Pada Penelitian Purwantoro (2015) ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem e-audit di sektor publik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan secara signifikan mempengaruhi penggunaan sistem. Selain itu, persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi persepsi kegunaan. Temuan ini memvalidasi relevansi

Technology Acceptance Model (TAM) dalam konteks penerimaan sistem e-audit di sektor publik.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi empat faktor eksternal yang mempengaruhi penggunaan sistem melalui persepsi kemudahan penggunaan: dukungan manajemen, pelatihan, dukungan, dan computer self-efficacy. Satu faktor eksternal, yaitu kemampuan untuk menunjukkan hasil, mempengaruhi penggunaan sistem melalui persepsi kegunaan. Sebaliknya, keterlibatan pengguna, relevansi pekerjaan, dan kualitas output ditemukan tidak berpengaruh pada penggunaan sistem melalui persepsi kegunaan. Menurut Penelitian yang dilakukan Cahyono dan Siswantoro (2016) Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan sistem e-audit dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Berdasarkan teori Whitten dan Bentley serta teori Kendall dan Kendall, analisis kelayakan dilakukan dengan menilai lima kriteria utama: kelayakan operasional, kelayakan teknis, kelayakan budaya, kelayakan jadwal, dan kelayakan hukum.

Dalam penelitian tersebut, metode wawancara, observasi, dan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan empat responden, yang terdiri dari dua orang pemeriksa BPK dan dua orang dari tim pengembangan sistem e-audit. untuk memenuhi harapan tinggi dari para stakeholder serta mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya BPK, sistem e-audit dapat menjadi solusi yang efektif jika dinilai layak berdasarkan kelima kriteria tersebut. Evaluasi yang komprehensif memastikan bahwa sistem ini dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Penelitian Siti Mubiroh (2019) Dalam implementasi e-audit, auditor menghadapi beberapa kendala. Fitur e-audit belum mencakup semua data yang diperlukan untuk pemeriksaan karena cakupan pemeriksaan yang sangat luas dan tidak semua data terhubung dengan e-audit. Ketidaksediaan data dalam fitur LKPD menjadi kendala karena kurangnya kesadaran entitas pemerintah daerah untuk mengunggah data LKPD ke portal e-audit, sehingga auditor harus menunggu data tersebut dari entitas pemerintah daerah. Selain itu, informasi tentang belanja perjalanan dinas hanya tersedia jika menggunakan maskapai Garuda Indonesia, karena portal e-audit belum mencakup maskapai atau transportasi lain. Harga tiket yang tercantum di fitur Manifes Garuda adalah harga resmi dari Garuda Indonesia, tidak termasuk harga dari agen, sehingga jika tiket dibeli melalui agen, informasi di portal e-audit tidak akurat.

Dalam keseluruhan, efektivitas sistem e-audit terhadap lembaga publik dan pemerintahan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas auditor, meningkatkan kualitas temuan audit, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas pengawasan, kualitas informasi, dan pemeriksaan (Amran, Nor, Purnamasari, & Hartanto, 2021; Fadilah, Maemunah, Lim, & Sundary, 2019; Nurcholisah, Purnamasari, & Sukarmanto, 2023; Oktaroza, Purnamasari, Hartanto, & Rahmani, 2022; Purnamasari, Rahmani, & Hartanto, 2020; Purnamasari & Umiyati, 2019). Implementasi e-audit memungkinkan BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara secara lebih efisien dan efektif. Proses pengumpulan data, analisis, dan pertukaran informasi dapat dilakukan secara elektronik, mengurangi keterlambatan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemeriksaan tradisional. Dengan menggunakan sistem e-audit, BPK dapat memperoleh akses langsung ke data yang diperlukan dari entitas pemeriksaan (seperti kementerian, pemerintah daerah, BUMN). Hal ini meningkatkan akurasi dalam mengaudit keuangan negara dan meningkatkan tingkat transparansi dalam proses pemeriksaan.

E-audit mempengaruhi KAP dengan mendorong adopsi teknologi dalam praktik mereka. KAP yang menggunakan teknologi e-audit dapat memberikan layanan audit yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan klien mereka (Oktaroza, Maemunah, Hartanto, &

Purnamasari, 2022). KAP yang mampu mengimplementasikan e-audit secara efektif dapat menarik klien dengan menawarkan solusi audit yang canggih dan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan (Lestari, Purnamasari, & Sukarmanto, 2022; Nurcholisah, Nurleli, & Nurfahmiyati, 2023). E-audit harus dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna, termasuk BPK sebagai badan pemeriksa dan KAP sebagai penyedia jasa audit. Hal ini mencakup kebutuhan akan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Implementasi e-audit juga memerlukan kesiapan organisasi secara keseluruhan dalam mengadopsi perubahan teknologi dan budaya kerja yang mendukung. Penerimaan dan integrasi e-audit dalam budaya organisasi yang sudah mapan dapat menjadi tantangan tersendiri.

## 5. Kesimpulan

Penerapan e-audit oleh BPK RI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penugasan audit, khususnya pada tahap perencanaan dan pemeriksaan lapangan, yang sebelumnya masih menggunakan proses manual. E-audit mengintegrasikan sistem manajemen audit BPK dengan database klien untuk menganalisis dan memverifikasi data. Dengan akses elektronik ke sebagian besar data pemeriksaan lapangan, e-audit dirancang untuk merampingkan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tahap audit ini. Selain itu, proses perencanaan audit dapat memperoleh manfaat yang signifikan dari integrasi data tersebut.

Secara keseluruhan, implementasi e-audit memberikan peluang besar bagi BPK dan KAP di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan layanan mereka dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara dan audit publik. Namun, tantangan seperti kesiapan teknologi, kesadaran akan pentingnya keamanan data, dan pelatihan tenaga kerja yang memadai tetap menjadi faktor kritis yang harus diatasi untuk mengoptimalkan manfaat dari e-audit ini.

## Daftar Pustaka

- Ali, Q., Parveen, S., Aspiranti, T., Nurhayati, N., & Rusgianto, S. (2023). Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis. *International Journal of Ethics Systems*.
- Amaliah, I., Aspiranti, T., Nurhayati, N., Mafruhah, A. Y., Numan, A. H., & Shahrudin, A. (2021). Macroeconomic coordination: as an approach for poverty reduction. *Polish Journal of Management Studies*, 23(2), 42-56.
- Amran, N. A., Nor, M. N. M., Purnamasari, P., & Hartanto, R. (2021). Perspectives on Unethical Behaviors among Accounting Students in Emerging Markets. *International Journal of Innovative Research Scientific Studies*, 4(4), 247-257.
- Cahyono, T. T., & Siswantoro, D. (2016). Analisis Kelayakan E-Audit Untuk Pemeriksaan Keuangan Negara Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–21.
- Daud, M. (2023). Electronic Audit in Auditing Financial Statements of Local Governments. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 8(1)
- Dharma, D. P. B., Sandhyaduhita, P. I., Pinem, A. A., & Hidayanto, A. N. (2017). Antecedents of intention-to-use of e-audit system: A case of the Audit Board of the Republic of Indonesia. *International Journal of Business Information Systems*, 26(2), 185–204.

- Fadilah, S., Lestari, R., Sahdan, M. H., & Sahdan, A. Z. A. (2020). The impact of renewable energy consumption on the economic growth of the ASEAN countries. *International Journal of Energy Economics Policy*, 10(6), 602-608.
- Fadilah, S., Maemunah, M., & Hernawati, N. (2019). Community social empowerment in Zakat community development. *Mimbar*, 35, 471-480.
- Fadilah, S., Maemunah, M., Lim, T. N., & Sundary, R. I. (2019). Forensic accounting: fraud detection skills for external auditors. *Polish Journal of Management Studies*, 20.
- Fadilah, S., Nurleli, N., Rosdiana, Y., Nurcholisah, K., Maemunah, M., & Hartanto, R. (2021). Measuring The Performance of Zakat Programs Using The Activity Ratio. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2), 314-326.
- Fadilah, S., Rosidana, Y., Maemunah, M., Hernawati, N., Sukarmanto, E., & Hartanto, R. (2021). Multidimensional scaling (Mds): Sustainability assessment model of community economic empowerment. *Polish Journal of Management Studies*, 24.
- Izzaturahman, M. K., Lestari, R., & Nurhayati, N. (2023). What Drives MAIS Quality of Islamic Banks in Indonesia? *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(2), 613-632.
- Kholis, A., & Prayogi, W. (2020). Analysis Acceptance of E-Audit Application on the Financial Audit Board of the Republic of Indonesia in North Sumatera Regional Office. Atlantis Press.
- Lestari, R., Purnamasari, P., & Sukarmanto, E. (2022). Autokorelasi Laba Dan Volatilitas Laba: Peningkat Audit Delay? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 260-274.
- Mubiroh, S. (2019). Analisis Implementasi E-audit untuk Pemeriksaan Keuangan Negara Studi pada BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 15.
- Nurcholisah, K., Nurleli, N., & Nurfahmiyati, N. (2023). Intellectual capital profile dengan pendekatan VAIC: efisienkah di bank syariah. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1650-1656.
- Nurcholisah, K., Purnamasari, P., & Sukarmanto, E. (2023). Analisis Tren Kecurangan Laporan Keuangan Perbankan: Pre Dan Post Pandemic Covid Di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 202-215.
- Nurhasanah, N., Nurhayati, N., & Surahman, M. (2020). Micro finance in sharia rural banks in Indonesia: a case study. *Entrepreneurship Sustainability Issues*, 7(4), 3455.
- Nurhayati, N., Hartanto, R., Paramita, I., Sofianty, D., & Ali, Q. (2023). The predictors of the quality of accounting information system: Do big data analytics moderate this conventional linkage? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, Complexity*, 9(3), 100105.
- Nurhayati, N., Hartanto, R., & Pramono, I. P. (2023). An Empirical Study on the Impacts of Quality Information and Competency of User on the Quality of Zakat Management Information System in Indonesia. *Journal of System Management Sciences*, 13(3), 233-243.
- Nurhayati, N., & Susanto, A. (2017). The influence of transformational leadership on the success of accounting information systems implementation (Survey on national Zakat management institution of West Java). *Journal of Engineering Applied Sciences*, 12(17), 4534-4539.
- Oktaroza, M. L., Maemunah, M., Hartanto, R., & Purnamasari, P. (2022). Work Ethics Strengthen the Impact of Distribution Knowledge Sharing on Innovation Abilities in Small Public Accountant Firms. *Journal of Distribution Science*, 20(7), 35-46.
- Oktaroza, M. L., Purnamasari, P., Hartanto, R., & Rahmani, A. N. (2022). Red Flag Effectiveness in Public Sector Audit Using Fraud Pentagon Theory. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 338-347.

- Purnamasari, P., Amran, N. A., & Hartanto, R. (2022). Modelling computer assisted audit techniques (CAATs) in enhancing the Indonesian public sector. *F1000Research*, 11.
- Purnamasari, P., Amran, N. A., Nu'man, A. H., Frendika, R., Nor, M. N. M., & Ismail, M. S. (2022). Penta-helix model of e-government in combating corruption in indonesia and malaysia: The moderating effect of religiosity. *F1000Research*, 11.
- Purnamasari, P., Pramono, I. P., Haryatiningsih, R., Ismail, S. A., & Shafie, R. (2020). Technology acceptance model of financial technology in micro, small, and medium enterprises (MSME) in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics Business*, 7(10), 981-988.
- Purnamasari, P., Rahmani, A. N., & Hartanto, R. (2020). Does Spirituality In The Workplace Reflect The Relationship Between Accounting And Corruption Prevention? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 414-429.
- Purnamasari, P., & Umiyati, I. (2019). Asymmetric Cost Behavior and Choice of Strategy. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 24-33.
- Purwanto, F., Purwandari, B., & Shihab, M. R. (2016). E-audit system acceptance in the public sector: An Indonesian perspective. In ICACSI 2015 - 2015 International Conference on Advanced Computer Science and Information